

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Dawan Rahardjo berpendapat bahwa terdapat beberapa elemen masalah yang menjadi perhatian para ahli ekonomi, yaitu: (1) kegiatan yang dilakukan oleh orang seorang dan masyarakat dalam produksi, distribusi atau pertukaran, dan konsumsi; (2) pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa atau kebutuhan hidup; (3) keharusan untuk memilih alternatif, baik dalam menentukan berbagai tujuan, maupun dalam menggunakan sumber-sumber, yang mengandung berbagai alternatif; dan (4) terdapatnya sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang dianggap terbatas (Rahardjo, 1990:112).¹ Kita sebagai manusia merupakan *khalifah* di dunia tidak diperbolehkan untuk memiliki sifat individualistik, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT semata, dalam Ekonomi Islam selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat kecil atau selalu yang menyentuh pada bidang pembangunan ekonomi kerakyatan yaitu bagaimana masyarakat bisa aktif dapat meningkatkan penghasilannya.² Sedangkan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).³

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa *pandemic corona virus disease 2019* (Covid-19) upaya peningkatan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok merupakan salah satu upaya penting menjaga

¹ Januari dkk., "Ekonomi Islam sebagai Disiplin Ilmu."

² Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan," 299.

³ Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," 31.

kestabilan perekonomian rumah tangga. Adanya bencana alam berupa wabah pandemi covid-19 mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perekonomian dunia. Di Indonesia pandemi covid-19 sangat bisa dirasakan dampaknya.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan atau undang-undang. Dalam pembentukan undang-undang secara komprehensif ada tiga dimensi perlu di perhatikan, yaitu masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa, masa kini adalah kondisi objektif yang ada sekarang dengan lingkungan strategisnya dan masa depan yang di cita-citakan.⁴ Sesuai dengan dimensi tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk meluncurkan berbagai program jaring pengaman sosial (JPS). Program Sembako yang termasuk dalam program reguler merupakan bagian dari program JPS untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Saat ini Kementerian sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan Undang-undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dana atau pemberdayaan social. Program bantuan sosial yang sudah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diantaranya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan PBI-JK.⁵

Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah 2.324.84 Km² dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan dan 165 Desa, 16 Kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Batujajar, Kecamatan Cihampelas,

⁴ Syarifin dan Jubaedah, "Ilmu Perundang-Undangan," 25.

⁵ Adminpusdatin, "Peraturan Tentang Bansos."

Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipeundeuy, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Lembang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Rongga, Kecamatan Saguling dan Kecamatan Sindangkerta.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk di Kab. Bandung Barat

| NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |
|---------------|----------------|------------------------|
| 1 | Batujajar | 108.579 |
| 2 | Cihampelas | 133.684 |
| 3 | Cikalong Wetan | 125.630 |
| 4 | Cililin | 96.128 |
| 5 | Cipatat | 141.789 |
| 6 | Cipeundeuy | 87.376 |
| 7 | Cipongkor | 99.797 |
| 8 | Cisarua | 79.118 |
| 9 | Gunung Halu | 77.912 |
| 10 | Lembang | 194.937 |
| 11 | Ngamprah | 175.874 |
| 12 | Padalarang | 182.981 |
| 13 | Parongpong | 110.537 |
| 14 | Rongga | 58.998 |
| 15 | Saguling | 34.505 |
| 16 | Sindangkerta | 73.122 |
| Jumlah | | 1.780.767 |

Sumber : Profil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Dilihat dari data jumlah penduduk tahun 2020 untuk kepadatan penduduk di masing-masing Kecamatan tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Lembang, jumlah Penduduk paling rendah berada di Kecamatan Saguling. Penyebaran ekonomi penduduk yang tidak merata ini dapat

mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masing-masing wilayah disamping faktor lain yang mempengaruhinya.⁶

Garis kemiskinan saat ini telah mencapai tingkat yang tinggi di susul dengan adanya wabah yang melanda negeri ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan namun hal ini belum mencapai tingkat taraf signifikan. Berdasarkan data yang di langsir dari BPS saat ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, terdapat dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Diagram Angka Kemiskinan Penduduk Kab. Bandung Barat
Tahun 2016 sd Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat

Dalam menghitung angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan).

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya dalam memulihkan perekonomian. Kemiskinan harus segera diatasi karena menimbulkan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan atas fenomena kemiskinan yang berlangsung

⁶ Saparudin, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014.”

tersebut, antara lain semakin tinggi tingkat pengangguran, kriminalitas, dan banyaknya anak putus sekolah. Sehingga kemiskinan tentu menjadi masalah nasional yang harus diatasi secara serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 yang dilakukan melalui berbagai macam strategi yaitu, 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

PKH merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan/komponen yang telah ditetapkan, persyaratan atau komponen tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.2
Program Keluarga Harapan

| PROGRAM KELUARGA HARAPAN | |
|---------------------------------|--|
| Persyaratan / Komponen | BANDUNG Kriteria |
| Pendidikan | Anak yang berusia 6-21 tahun dan terdaftar pada satuan pendidikan dan belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun |
| Kesehatan | Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas |
| Kesejahteraan sosial | Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat |

Sumber: Permensos No. I Tahun 2018

Program PKH pada tabel 1.3 ini merupakan bantuan bersyarat yang mana persyaratan/ komponennya secara umum di bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus

rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta merubah perilaku KPM PKH Yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), ada 5 komponen tujuan MDGs yang didukung melalui Program keluarga harapan (PKH) yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan
2. Pencapaian Pendidikan Dasar
3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
4. Pengurangan Angka Kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu⁷

Program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang terutama di masa pandemi covid19 saat ini sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan terpeliharanya taraf hidup masyarakat akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tabel 1.3
Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bandung Barat Periode Tahun 2020

| Kecamatan | Jumlah Penerima |
|---------------|-----------------|
| Batujajar | 2.986 |
| Cihampelas | 7.199 |
| Cikalongwetan | 6.223 |
| Cililin | 5.735 |
| Cipatat | 7.958 |
| Cipeundeuy | 4.451 |
| Cipongkor | 7.117 |
| Cisarua | 2.077 |
| Gununghalu | 3.982 |

⁷ A. Jajang W. Mahri, "Ekonomi Pembangunan Islam."

| | |
|---------------|---------------|
| Lembang | 6.349 |
| Ngamprah | 3.824 |
| Padalarang | 5.182 |
| Parongpong | 1.979 |
| Rongga | 4.194 |
| Saguling | 2.473 |
| Sindangkerta | 3.770 |
| Jumlah | 75.499 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Dari Tabel diatas bisa dilihat bahwa data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) paling banyak adalah Kecamatan Cipatat dengan jumlah 7.958 Keluarga, sedangkan jumlah jumlah keluarga yang paling sedikit adalah kecamatan Parongpong dengan jumlah 1.979 Keluarga Penerima Manfaat di tahun 2020. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat tentunya akan mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya, menurut Dewi Koordinator PKH Kabupaten Bandung Barat penurunan KPM disebabkan oleh adanya graduasi, graduasi sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu graduasi sejahtera dan graduasi alamiah, graduasi sejahtera adalah Keluarga Penerima Manfaat tersebut sudah sejahtera jadi dikeluarkan dari penerima Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan graduasi alamiah adalah Keluarga Penerima Manfaat tersebut sudah tidak memiliki komponen atau katagori penerima manfaat program keluarga harapan, sedangkan kenaikan jumlah KPM biasanya di sebabkan oleh bertambahnya keadaan ekonomi masyarakat yang kurang sejahtera, namun pada saat pandemi covid 19 melanda Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial di Kabupaten Bandung Barat pun mengalami kenaikan ini disebabkan karena data calon Keluarga Penerima Manfaat yang diambil oleh pusat adalah bersumber dari aplikasi sapawarga dan belum adanya verifikasi dan validasi dari pejabat wilayah, pendamping PKH dan Kader PKH Desa apakah calon keluarga penerima manfaaat bantuan tersebut layak atau tidak menerima bantuan namun dari kementrian sosial

sudah mencairkan bantuan-bantuan tersebut sehingga ini bisa berakibat tidak tepatnya sasaran penerima bantuan.⁸

Selain Bantuan Program Keluarga Harapan, Pemerintah daerah Bandung Barat pun dalam menanggulangi keadaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid 19 ini dengan meningkatkan program bantuan social dan penyaluran bantuan yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2018 bantuan tersebut merupakan program masalah ketidakcukupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat mengurangi beban pengeluaran belanja masyarakat yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan ini berjenis pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM yang ditransfer setiap bulannya melalui akun elektronik yaitu KKS yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung tempat yang telah bekerja sama dengan bank. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 yang disahkan pada tanggal 12 Juli 2017 berisi tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Besaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebelumnya pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Rp. 110.000/KPM setiap bulannya. Pada tahun 2020 bulan Januari-Februari Rp.150.000 setiap bulannya, tetapi dalam rangka untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 maka sejak bulan maret 2020 pemerintah menaikkan besaran manfaat program bantuan ini menjadi Rp. 200.000/KPM. Pemerintah pun merubah bahan pangan yang dapat dibelanjakan, sebelumnya hanya dapat membeli beras dan telur saja tetapi pada tahun 2020 memiliki perubahan menjadi 4 komoditas bahan pangan yaitu sumber karbohidrat, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sumber vitamin dan mineral.

Anggaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan anggaran yang dikeluarkan oleh pusat atau yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara, berikut jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Negara untuk penyaluran bantuan Program Keluarga harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Bandung Barat.

⁸ Dewi, Tanggapan Mengenai Bantuan Sosial PKH dan BPNT (Koordinator Bansos Kabupaten Bandung Barat).

Tabel 1.4
Jumlah Anggaran Bantuan PKH dan BPNT
Untuk Kab. Bandung Barat Tahun Periode 2016-2020

| NO | TAHUN | PKH (Rp) | BPNT (Rp) | JUMLAH (Rp) |
|----|-------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2016 | 6.107.459.700 | 27.334.000.000 | 33.441.459.700 |
| 2 | 2017 | 6.718.219.725 | 27.902.000.000 | 34.620.219.725 |
| 3 | 2018 | 7.797.500.000 | 37.841.000.000 | 45.638.500.000 |
| 4 | 2019 | 9.356.640.000 | 41.374.850.000 | 50.731.490.000 |
| 5 | 2020 | 20.282.800.000 | 54.517.500.000 | 74.800.300.000 |

Sumber : Dinsos KBB

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 pada masa pandemi covid19 Kabupaten Bandung Barat memperoleh alokasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai paling tinggi dari tahun sebelum-sebelumnya, yaitu mengalami kenaikan kurang lebih sebesar 50% dimana pada tahun 2019 berjumlah Rp. 50.731.490.000,00 sedangkan pada tahun 2020 berjumlah Rp. 74.800.300.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara atau APBN.

Terdapat dalil al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena

mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya". (Q.S Al-Maidah: 2).⁹

Ayat di atas secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat keunggulan dalam berkerjasama dalam hal kebaikan. Realisasi dari kserjasama dalam hal kabaikan ini dapat tercermin pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana kaum yang memang masuk dalam kriteria sejahtera ataupun kaum yang mempunyai kewenangan hak otoriter saling bekerjasama satu sama lain untuk pemberdayaan masyarakat yang masuk dalam kriteria kurang sejahtera, sehingga masyarakat yang kurang sejahtera itu dapat hidup secara mandiri, dapat meningkatkan pendapatannya, dan dapat hidup sejahtera.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ - ١١

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia". (Q.S Ar-Ra'd : 11).¹⁰

Ayat 11 pada qur'an surat Ar-Ra'd terdapat penggalan ayat yang artinya "Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya", maka secara tidak langsung ayat ini memberikan motivasi kepada siapapun yang ingin mengubah dirinya dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera, dari yang kurang berkecukupan menjadi berkecukupan. Ayat diatas juga menekankan kepada kita jika ingin mengubah diri, ekonomi, sikap, dan lain sebagainya itu bukan berasal dari orang lain, akan tetapi dari diri kita sendiri.

⁹ Abdul Aziz Ahmad, *Robbani, Al-Qur'an Per kata, tajwid warna*.

¹⁰ Abdul Aziz Ahmad.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu ingin mensejahterakan masyarakat dimulai dari terpenuhinya pendidikan dasar warga masyarakat, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, mengurangi pengangguran dan mengurangi angka kematian. Karena tidak sedikit fakta dilapangan ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran dan bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat tidak digunakan atau dibelanjakan sebagaimana mestinya.

Dari beberapa latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Daya beli dalam Meningkatkan Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Penerima Manfaat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini disusun secara sistematis, dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap daya beli keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020?
2. Apakah terdapat pengaruh penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap daya beli keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020?
3. Apakah terdapat pengaruh penyaluran Bantuan PKH dan Penyaluran BPNT terhadap daya beli keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020?
4. Apakah terdapat pengaruh daya beli keluarga penerima manfaat dalam Meningkatkan Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020?
5. Apakah terdapat pengaruh penyaluran Bantuan PKH dan Penyaluran BPNT terhadap daya beli dalam meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan

pokok keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh penyaluran bantuan PKH terhadap daya beli Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap daya beli Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid19 di Kab. Bandung Barat tahun 2020;
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh bantuan PKH dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap daya beli keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh daya beli keluarga penerima manfaat dalam Meningkatkan Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah terdapat pengaruh bantuan PKH dan Penyaluran BPNT terhadap daya beli dalam meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid19 di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan dan rujukan bagi semua pihak, yang akan mendalami ilmu ekonomi mengenai pengaruh dengan adanya bantuan social dan penyaluran modal umkm dari pemerintah terhadap keluarga penerima manfaat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ekonomi khususnya yang berkaitan dengan Bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah terhadap keluarga Penerima Manfaat di Kab. Bandung Barat.

b. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan program-program Pemerintah dalam penanganan Ekonomi Nasional bagi warga kurang sejahtera khususnya dalam kaitan dengan Bantuan PKH, Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap daya beli dalam kapasitas pemenuhan kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat di Kab. Bandung Barat dan dapat juga digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

c. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pengaruh Bantuan PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Dayabeli dalam Peningkatan Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Penerima Manfaat khususnya di Kab. Bandung Barat.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Bantuan PKH dan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Keluarga Penerima Manfaat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Saparudin (2016). Tesis dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014*”, tujuan penelitian adalah mengetahui implementasi program pemberian dana hibah dan bantuan social di Kabupaten Tana Tidung dan mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hibah dan bantuan social di Kabupaten Tana Tidung. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, hasil Penelitian adalah Implementasi Kebijakan Program Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung berjalan cukup lancar. Walaupun masih belum dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tapi hampir semua tahap kegiatan pengusulan dan pengelolaan hibah dan bantuan social sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaan program hibah dan bantuan social adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Perbedaan dalam penelitian ini ialah dari metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian dan objek penelitian.¹¹
2. Muharir (2022). Jurnal berjudul “Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang”. Berdasarkan analisis Hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel Bantuan PKH sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi Kelompok penerima manfaat masyarakat Desa Tirta Makmur dan Hasil analisis regresi menyatakan bahwa variabel Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian berpengaruh secara signifikan terhadap Pola Konsumsi Kelompok penerima manfaat masyarakat Desa Tirta Makmur serta terdapat hubungan positif antara bantuan PKH dengan

¹¹ Saparudin, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014.”

pola konsumsi KPM masyarakat Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang Kab. Banyuasin. Perbedaan penelitian yaitu variabel dan objek penelitian.¹²

3. Novy Arthamevia dan Hendra Sukmana (2022). Jurnal berjudul “Analisis Program Keluarga Harapan”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mempergunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa agar Program Keluarga Harapan (PKH) dikatakan tepat sasaran, jika dalam target dan proses tercapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua aspek integrasi, didalam bagian proses sosialisasi terdapat pengembangan keterampilan yang masih belum terlaksanakan dalam kegiatan PKH. Dari ukuran integrasi tersebut yang berkaitan dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan anggota PKH karena akan memberikan efek didalam keberlangsungan hidupnya baik didalam lingkungan keluarga, PKH, dan masyarakat. Ketiga dilihat dari aspek adaptasi setiap pendamping sudah memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman mengenai Program Keluarga Harapan serta pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting terhadap kegiatan PKH. keempat yaitu aspek pengawasan dilaksanakan pada setiap tahap penyaluran bantuan, pengawasan dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran bantuan PKH.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini ialah dari metode penelitian yang digunakan, variabel penelitian dan objek penelitian.
4. Fahrozi dan Yovi Novanda (2023) jurnal yang berjudul “Pengaruh program BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukanegara Kecamatan Belitang III (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukanegaea Kecamatan

¹² Muharir, “Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Kecamatan Air Kumbang.”

¹³ Arthamevia dan Sukmana, “Analisis Program Keluarga Harapan.”

Belintang III dari segi perspektif hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif, hasil penelitian adalah Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa sukanegara kecamatan belintang III hanya memenuhi kebutuhan ad-dharuriyyat atau kebutuhan pangan saja sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan hanya mengurangi beban pengeluaran pangan sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan lainnya.¹⁴

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah, juga untuk memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar tingkat dayabeli dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat.
2. Informasi yang disajikan mengenai Bantuan PKH, BPNT dan tingkat dayabeli dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

G. Kerangka Berfikir

Permasalahan kemiskinan yang terdapat di Indonesia merupakan permasalahan yang menarik guna dikaji secara berulang-ulang. Kemiskinan ialah perkara yang mendasar yang senantiasa jadi atensi oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri jika kemiskinan masih jadi permasalahan terberat serta sangat krusial di dunia sehingga sesuatu negeri wajib mempunyai terobosan yang berkaitan dengan kebijakan sehingga sanggup untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Indonesia sendiri mempunyai salah satu program penanggulangan kemiskinan, Program penanggulangan kemiskinan

¹⁴ Novanda, "Pengaruh Program Bpnt Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukanegara Kecamatan Belintang III (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)."

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga buat tingkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui dorongan sosial, pemberdayaan penduduk, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka tingkatkan aktivitas ekonomi. Salah satu program yang dihadirkan pemerintah Indonesia yang diharapkan tepat sasaran sehingga bisa mengurangi kemiskinan yakni Program Keluarga Harapan (PKH).

Khurshid Ahmad menegaskan bahwa konsep pembangunan yang Islami sebenarnya dapat ditarik dari konsep *tazkiyah*, yang berarti penyucian terhadap sikap dan hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari *tazkiyah* adalah *falah*, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. Asas *tauhid*, *khalifah* dan *tazkiyah* pada akhirnya menuju ke perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Asas *tauhid* mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi. Asas *khalifah* mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya. Dan asas *tazkiyah* mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan pemerataan yang bermuara pada keadilan. Kesemuanya itu akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya adalah pelaksanaan asas *rububiyah*, yakni asas pendidikan, pemeliharaan dan kontinuitas menuju kepada kesempurnaan, seperti sifat Ilahi. Dengan demikian, jika keempat nilai yang dirumuskan oleh Khursyid Ahmad tersebut dapat terealisasikan dalam pembangunan ekonomi yg dibangun di Indonesia, maka negara akan dengan mudah mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu negara yang sejahtera dan berkeadilan.¹⁵

Upaya pengentasan kemiskinan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Pemerintah Indonesia memiliki strategi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan:

- (a) Mengurangi beban masyarakat miskin;
- (b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan dan usaha mikro kecil;

¹⁵ Fadlan, "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Yang Adil, Makmur, Dan Sejahtera)," 265.

(d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

KPM/PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas Kesehatan (faskes) dan fasilitas Pendidikan (fasdik). Kewajiban KPM/PKH dalam bidang Kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi serta imunisasi dan menimbangkan berat badan balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban dalam bidang Pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan Pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berat dan lansia mulai umur 60 tahun.¹⁶

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Selain itu bantuan social pun dapat diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.¹⁸

Menurut International Labour Organization (ILO), mengemukakan bahwa kebutuhan primer merupakan suatu kebutuhan fisik yang minimal di masyarakat, yang berkaitan dengan tercukupnya kebutuhan pokok masyarakat, baik masyarakat mayoritas maupun masyarakat minoritas.¹⁹ Dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut, tidak hanya dipengaruhi ketersediaan barang serta dipengaruhi oleh aspek harga barang yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Pada saat dalam keadaan harga kebutuhan pokok bertambah drastis, hingga sebagian besar masyarakat mengeluh, serta kemudian akan menambahkan beban anggaran yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi kasus tersebut, masyarakat berinisiatif untuk meminimalisir kebutuhan sehari-hari. Masyarakat mengambil

¹⁶ Arthamevia dan Sukmana, "Analisis Program Keluarga Harapan," 2.

¹⁷ Subbagian Hukum, "Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

¹⁸ "Permendagri No. 32 Tahun 2011."

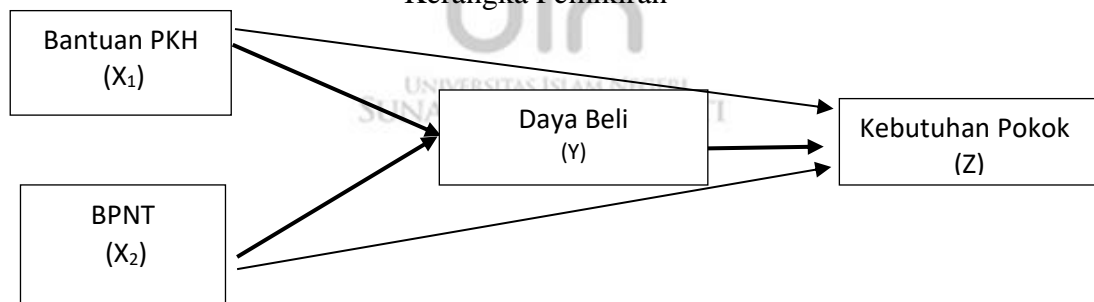
¹⁹ Oktafia and Ei, "Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Lebaran," 4.

langkah dengan cara memperkecil pengeluaran serta mengurangi jumlah barang yang hendak dibeli.

Menurut Wachowicez (2007) dalam penelitian Fitriani daya beli merupakan kesanggupan masyarakat dalam mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Daya beli masyarakat berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka hendak mempengaruhi daya beli masyarakat. Pendapatan masyarakat berhubungan erat dengan pekerjaan. Jika mempunyai pekerjaan dengan pendapatan tetap, maka hendak mempengaruhi daya beli masyarakat.²⁰

Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah Bantuan PKH (X_1), Penyaluran BPNT (X_2), sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah Tingkat Daya beli (Y), dengan variabel intervening dalam kapasitas pemenuhan kebutuhan pokok (Z), Secara teoretis hubungan antar variabel yang akan diteliti dijelaskan di dalam kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara mengenai sesuatu objek/subjek yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.²¹

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah

²⁰ Fitriani, "Studi Strategi Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Bekasi," 33.

²¹ Hamid Darmadi, "Metode Penelitian pendidikan dan sosial."

yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga adanya pengaruh penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap tingkat dayabeli Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kab. Bandung Barat tahun 2020.
2. Diduga adanya pengaruh penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap tingkat dayabeli Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
3. Diduga adanya pengaruh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
4. Diduga adanya pengaruh penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap kebutuhan pokok Keluarga Penerima Manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
5. Diduga adanya pengaruh penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap daya beli keluarga penerima manfaat pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020;
6. Diduga adanya pengaruh daya beli keluarga penerima manfaat dalam Meningkatkan Kapasitas Pemenuhan Kebutuhan Pokok pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.